

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kriminologi

1. *Differential Association*

Sutherland(1939) dalam buku teksnya, *Principles of Criminology* menghadirkan tentang *Differential Association*, dimana menarangkan tentang bagaimana proses bertingkah laku kriminal melalui interaksi sosial..¹ Tidak hanya itu *Differential Association* di dasarkan pada sekian banyak proposisi yaitu:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Seseorang tidak hendak langsung sebagai kriminal dengan hanya hidup dilingkungan kriminal, melainkan kejahatan tersebut bisa dipelajari dengan berpartisipasi dengan orang yang berperilaku kriminal ataupun dalam komunikasi..
- 3) Tingkah laku kriminal itu terjalin di dalam kelompok– kelompok orang yang seksual/ dekat. Yang diartikan dengan orang inti/ dekat ialah keluarga, sahabat dekat yang memiliki pengaruh yang besar dalam menekuni tingkah laku yang menyimpang..²

Jadi bagi penulis menimpa Teori *Differential Association* ini, berkembang kembangnya seorang itu berasal dari pergaulan, komunikasi.

¹ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa . 2024 “Kriminologi”, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal.75

² Ibid

Dimana sebagian kelompok itu semacam keluarga, sahabat sangat pengaruhi dalam karakter orang tersebut. Dimana orang terdekat kita melaksanakan aksi yang rasanya mempengaruhi sikap negatif, hingga orang tersebut secara tidak langsung hendak menjajaki sikap tersebut. Sehingga dari itu pemicu terbentuknya sikap kriminal bisa dipelajari dari area warga serta keluarga.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori ini berkomentar jika tiap orang memiliki kemauan guna melaksanakan sesuatu tindak pidana serta menyimpang. Dalam kaitannya dengan teori kontrol, bagi komentar Reiss terdapat 3 komponen yang bisa menarangkan kenakalan anak muda, ialah minimnya kontrol internal yang normal sepanjang masa anak- anak, hilangnya kontrol tersebut, serta tidak terdapatnya norma- norma sosial ataupun konflik antar norma tersebut(di sekolah, di keluarga, ataupun area dekat). Dimana Reiss membedakan 2 berbagai kontrol yakni:³

- a. personal control, ialah keahlian seorang menahan diri buat tidak menggapai tujuannya dengan metode yang melanggar norma;
- b. social control ialah keahlian warga guna melakukan norma- norma ataupun peraturan perundang- undangan..

³ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Juni 2018, “Penerapan Teori – Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, Volume 13. Number 1 Page 10-13, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/14020>. 12 Januari 2021
Nurul Hidayati, April 2012, “Bullying pada anak: Analisis dan Alternatif Solusi”, INSAN Vol. 14 No. 01, <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-artikel%205-14-1.pdf>. 12 Desember 2020

Manusia di dalam teori kontrol sosial dipandang sanggup mengendalikan tingkah laku serta pula mempunyai strategi– strategi dalam mengendalikan tingkah laku serta bisa membawa kepada ketaatan kepada peraturan yang terdapat di dalam warga. Dengan kata lain seseorang tersebut wajib mampu mengendalikan tingkah lakunya guna membawa ketaatan yang mana tingkah laku tersebut pasti saja mempunyai strategi yang mana wajib cocok dengan peraturan yang berlaku pada masyarakat. Terkadang perihal tersebut masih diduga sepele oleh warga, sementara itu sosial kontrol itu sangatlah berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila tidak terdapat sosial kontrol sehingga warga hendak melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan seenaknya serta tanpa terselip rasa ketentuan/ norma yang mengikat serta memandang kebutuhan/ kesenangan individu itu lebih berarti dari pada memandang apa yang sudah mereka timbulkan/ jalani untuk warga.

B. Tinjauan Terhadap Anak

Bagi UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 1 Kesejahteraan Anak merupakan sesuatu tata kehidupan serta penghidupan anak yang bisa menjamin perkembangan serta perkembangannya dengan normal, baik secara rohani, jasmani ataupun sosial.⁴ Maka dengan cara tersebut adanya pelayanan sosial yang di peruntukan untuk anak, agar kebutuhan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi, Anak yang tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan dan

⁴ UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

kesejahteraan berhak memperoleh bantuan, supaya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang baik dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak dan itu semua tidak mengecualikan terhadap pelaku tindak pidana anak. Maka dari itu, itu semua tidak luput dari perlindungan anak, perlindungan anak sendiri Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Oleh karena itu kepastian hukum sangat di perlukan agar dapat mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam terlaksananya perlindungan anak. Oleh sebab itu kepastian hukum sangat di perlukan supaya bisa menghindari penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di idamkan dalam terlaksananya perlindungan anak.

Sehingga dari itu perlunya batas– batas tentang anak dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar. Ada pula pengaturan tentang batas anak ialah:

⁵ UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶
2. Menurut UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 1 Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial,⁷
3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengertian Anak diatur di dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”⁸
4. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menentukan belum dewasa atau belum cukup umur (minderjaring) adalah seorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun, hal itu berkaitan dengan prosedur penuntutan bagi seorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun berbeda dengan yang telah melampaui usia itu. Hal itu diatur di dalam Pasal 45 KUHPidana yang isinya menyatakan “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang

⁶ ibid

⁷ UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun,”⁹

5. Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 nomor 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 1 nomor 4 dijelaskan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁰

1) Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 ayat(1) huruf a serta b ialah dalam perihal Anak belum berusia 12 (dua belas) tahun melaksanakan ataupun diprediksi melaksanakan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Handal mengambil keputusan guna:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pembelajaran, pembinaan, serta pembimbingan di lembaga pemerintah ataupun LPKS di lembaga yang menanggulangi bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkatan pusat

⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁰ Kitab Undang – Undang Peradilan Anak

ataupun wilayah, setidaknya lama 6 (enam) bulan. Anak bagi UU SPPA ini ialah anak yang berkonflik, ialah anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diprediksi melaksanakan tindak pidana..¹¹

Penjatuhan sanksi kepada anak dipengaruhi oleh umur pada dikala anak melaksanakan tindak pidana(tempus delicti). Syarat dalam pasal ini ialah apabila anak yang berumur 12 serta belum berusia 18 tahun hingga, apabila melaksanakan sesuatu tindak pidana hingga bisa dibebaskan dari seluruh wujud pidana. Tetapi bagi KUHP menarangkan kalau tidak terdapat batas umur minimum pertanggungjawaban pidana anak, disebabkan ketentuan menimpa hukum pidana anak yang ada dalam KUHP terlampau simpel serta tidak memandang pertumbuhan dari warga.

2) Anak sebagai Saksi dan Korban

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹² Bagi Pasal 1 Saksi ialah orang yang bisa dimintai penjelasan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pengecekan persidangan majelis hukum tentang sesuatu tindak pidana yang mana orang tersebut memandang sendiri, mendengar sendiri maupun terlebih lagi yang hadapi sendiri

¹¹ ibid

¹² Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

tercantum dengan seorang yang bisa dimintai penjelasan yang berhubungan dengan aksi pidana tersebut walaupun orang tersebut tidak memandang sendiri, tidak mengalami sendiri sejauh penjelasan tersebut bisa dipertanggungjawabkan serta berhubungan dengan tindak pidana..

Saksi disini ada 2 ialah saksi korban serta pula saksi pelakon. Dimana saksi korban sendiri menarangkan tentang anak yang mengalami secara langsung penderitaan baik raga ataupun psikis yang disebabkan oleh suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sebaliknya saksi pelakon ialah terdakwa/ tersangka yang melaksanakan suatu tindak pidana kepada korban yang mana saksi pelakon ini wajib mempunyai kerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana perkara yang dilakukan..

Pasti saja didalam saksi korban ataupun pelakon ini ada ketentuan yang mengikat. Saksi serta Korban pula berhak untuk memperoleh proteksi atas keamanan individu, keluarga, serta harta bendanya. Serta bebas dari bermacam ancaman yang bersangkutan dengan kesaksian yang hendak mereka bagikan ataupun sudah diberikan. Korban tindak pidana berhak memperoleh Ganti Rugi ataupun Restitusi berbentuk kerugian yang dialaminya contohnya semacam kerugian yang didapatkan dengan munculnya penderitaan yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan sesuatu tindak pidana. Atau pun pula dengan penggantian pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak korban dalam melaksanakan perawatan baik secara kedokteran maupun psikologis.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (26), “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”¹³. Dari yang dimaksud dalam pasal 1 Ayat (26) KUHP ini, seorang saksi adalah orang yang secara langsung terlibat dalam suatu perkara pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi, dimana mereka melihat sendiri dan mengalami kejadian tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 18: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

¹³ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat 1, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Saksi tersebut tidak hanya berupa saksi pelaku, melainkan terdapat saksi korban itu sendiri guna memberikan keterangan dari apa yang mereka alami, pelapor atau orang yang memberikan suatu informasi, pelaporan atau keterangan kepada para aparat penegak hukum mengenai tindak pidana yang sedang terjadi.

Dikarenakan terdapat pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban maka tentu saja ada lembaga yang memberikan perlindungan hukum yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan perlindungan terhadap hak – hak kepada saksi/korban sebagaimana dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat 5.¹⁴

LPSK tidak hanya membagikan proteksi kepada saksi/ korban saja, tetapi LPSK pula membagikan proteksi kepada saksi pelakon, pelapor serta pakar, tercantum juga orang yang bisa membagikan penjelasan mengenai permasalahan pidana yang berlangsung, dimana penjelasan permasalahan pidana tersebut orang itu melihat sendiri, serta tidak mereka

¹⁴ *ibid*

alami sendiri. Proteksi saksi serta korban tersebut diberikan semenjak sesi penyelidikan diawali serta diakhiri. Saksi, Korban, Pelapor, serta Saksi Pelakon tidak bisa dituntut secara hukum, baik secara pidana ataupun secara perdata kecuali pada saat pemberian kesaksian ataupun laporan diberikan dengan dasar itikad tidak baik ataupun mengada-ada, guna menjatuhkan salah satu pihak serta berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya..

C. Bullying

1) Tinjauan Terhadap Bullying

Bagi Sullivan dalam bukunya yang bertajuk “the Anti Bullying Handbook on 2000th”, bullying dimaksud sebagai aksi penyerangan”, yang dicoba secara sadar serta terencana dan atau dimanipulasi oleh satu atau lebih banyak orang terhadap orang lain ataupun banyak orang.¹⁵. Bullying bisa bertahan untuk waktu yang sedikit maupun apalagi sepanjang bertahun-tahun, dan ini menggambarkan suatu penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang melaksanakannya, terkadang dilakukan paling utama terhadap satu korban, serta terkadang terjalin secara berturut ataupun acak. Dengan kata lain bully ialah aksi negative yang dicoba oleh sebagian orang ke orang lain secara terus-menerus. Bullying ini menuju pada perlakuan yang kejam yang dicoba oleh seorang tersebut, aksi kekerasan bullying ini terkadang bisa menimbulkan korban, apalagi korban tersebut hingga terluka secara raga, psikis serta tidak berdaya.

¹⁵ Sullivan, Keith, The Anti-Bullying Handbook, Oxford University Press, London, 2000, hlm 45

Kecenderungan sikap bullying ini menuju kepada perlakuan aksi seorang dalam melukai, menyakiti seseorang itu secara kesekian– ulang secara terencana buat melukai, membagikan rasa tidak nyaman serta aman kepada korban tersebut. Pasti kecenderungan ini menampilkan kekuasaan sehingga membuat orang lain yang menjadi korban merasa lemah. Para bullying umumnya laki– laki namun tidak cuma lelaki saja bahkan terdapat sebagian wanita yang melaksanakan bullying disebabkan ia merasa lebih populer, lebih teratas serta mempunyai keahlian sosial yang besar. Tentusaja, para korban bullying tersebut umumnya dianggap lebih jauh di bawah mereka sang pembully ntah dari segi raga, psikis ataupun ekonomi.

Professor Serta Olweus pada tahun 1993 sudah mendefinisikan bullying yang memiliki 3 faktor mendasar sikap bullying, yakni:

- a) Bertabiat menyerang(kasar) serta negatif.
- b) Dilakukan secara kesekian kali.
- c) Terdapatnya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang ikut serta..¹⁶

Sedangkan jenis-jenis perilaku bullying menurut Astuti antara lain:

- a) Kekerasan raga(mendesak, menendang, memukul, menampar).
- b) Secara verbal(misalnya panggilan yang bertabiat mengejek ataupun celaan).
- c) Secara non- verbal(misalnya memanipulasi pertemanan, memandang

¹⁶ Olweus, D. Bullying at school: What We Know and What We Can Do. Oxford, Blackwell. 1993, hal. 9.

dengan muka mengecam, mengasingkan, serta menakut- nakuti.¹⁷

2) Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Bullying

Sikap bullying banyak terjadi di bermacam tempat, mulai dari ruang lingkup keluarga, warga, sekolah, sahabat serta lain– lain.. Bullying sendiri dapat dimaksud sebagai sesuatu perilaku seorang dimana perilaku tersebut membuat seorang yang jadi korban bullying, merasa terpojokan, sampai korban tidak bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik serta wajar, disebabkan rasa ketakutan serta tidak yakin diri yang membuat korban tersebut tidak dapat melaksanakan hidupnya dengan baik.

Bersumber pada informasi dari KPAI, dikala ini KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 hingga 2019, terdapat 37. 381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Buat Bullying baik di pembelajaran ataupun sosial media, angkanya menggapai 2. 473 laporan serta trennya terus bertambah.¹⁸ Secara garis besar aspek yang pengaruhi sikap bullying ialah Keluarga, Lingkungan, Teman, Sekolah. Tidak hanya itu dari karakter anak sendiri dapat jadi aspek utama dalam perlakuan bullying ini, anak yang memijak umur anak muda cenderung memiliki karakter yang beresiko sehingga butuh adanya pengawasan dari orang tua ataupun pendidik.

Disebabkan anak yang menginjak umur anak muda dalam proses bersosialisasi sangat gampang untuk dipengaruhi. Apabila dunia luar

¹⁷ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A.* Jakarta, TP. Grasindo, 2008, hal 3

¹⁸ Tim KPAI : *Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020*, dalam: <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>, 10 Februari 2020

mempunyai hubungan yang kokoh, sehingga anak akan gampang sekali tenggelam dalam dunianya tersebut serta kehilangan jati dirinya, beda lagi dengan anak yang mempunyai keyakinan diri yang sangat kokoh dapat membagikan aspek yang lebih positif, disebabkan anak tersebut tidak mudah untuk dipengaruhi oleh dunia luar serta dari teknik anak memandang segala hal dengan baik serta positif. Ia pula bisa mengendalikan emosi yang terselip dari dalam dirinya, dalam mengambil keputusanpun ia berani tanpa rasa khawatir untuk kandas maupun tertolak, apalagi sampai dengan dikucilkan.

Menurut Ariesto (2009), faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain: ¹⁹

a. Keluarga.

Kerap kali pelaku perundungan (bullying) berasal dari keluarga yang bermasalah, disebabkan tiap keluarga mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Contoh saja mengenai trik orang tua dalam mendidik anaknya, ada yang dengan metode baik ataupun salah, disebabkan anak senantiasa mencotah sikap yang dicoba oleh orang tua, apabila yang dilakukan orang tua baik sehingga anak akan berperilaku baik serta sebaliknya apabila orang tua berperilaku salah anak pula akan berperilaku yang sama. Maka dari itu apabila anak jadi pelaku

¹⁹ Ela Zain Zakiyah, Juli 2017, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", ISSN: 2442-448X : <file:///D:/Fakultas%20Hukum%20UMM/Skripsi/jurnal/faktor%20bullying.pdf>, 13 Desember 2020

perundungan(bullying). bisa jadi itu aspek dari sikap orang tua yang kemudian ditiru oleh anaknya. Maka dari itu keluarga itu penting dalam pembelajaran kepribadian anak.

b. Sekolah

Banyak sekali peristiwa dimana pihak sekolah kerap mengabaikan sikap bullying yang dilakukan oleh peserta didiknya. Akibat dari peristiwa ini, sebagian dari pelaku bullying memperoleh penguatan terhadap sikap mereka buat mengintimidasi para korban bullying. Banyak dari pihak sekolah yang hanya berpendapat perihal itu normal dilakukan oleh partisipan didik, tetapi itu semua sesungguhnya bukanlah wajar, disebabkan perbuatan dari pelaku perundungan(bullying) tersebut bisa mempengaruhi mental/ psikologis anak serta dapat saja memunculkan trauma yang hebat.

c. Faktor Kelompok Sebaya

Anak- anak ketika berinteraksi dalam sekolah serta dengan sahabat di dekat rumah, kadangkala terdorong untuk menerapkan bullying. Sebagian anak menerapkan bullying dalam usaha guna meyakinkan kalau mereka dapat masuk dalam kelompok tertentu, walaupun mereka sendiri merasa tidak aman dengan sikap tersebut..

d. Kondisi Lingkungan Sosial

Keadaan lingkungan sosial dapat pula sebagai pemicu munculnya sikap bullying. Salah satu aspek area social yang menimbulkan aksi bullying yakni kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan hendak berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran bila di area sekolah kerap terjalin pemalakan antar siswanya.

e. Tayangan Televisi dan Media Cetak

Tv serta media cetak membentuk pola sikap bullying dari segi siaran yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan Kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan jika 56, 9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, biasanya mereka meniru geraknya (64%) serta kata-katanya (43%).

3) Alat – Alat Yang Digunakan Dalam Pembullying

Dalam perundungan (bullying) biasanya tidak lepas dari alat yang digunakan dalam pembullying. Dalam pembullying, tidak hanya dengan cara memaki secara langsung ataupun melukai yang dapat menyebabkan cedera dan trauma. Bisa saja dengan cara mengirimkan pesan kepada korban yang berisikan cacian dan makian, peneroran ditempat perundungan tersebut, membuat si korban merasa takut dan terganggu, sehingga membuat korban tidak bisa menjalankan aktivitas nya dengan normal. Selain itu jika bertemu dengan korban secara langsung,

para pelaku perundungan (bullying), biasanya mengajak teman seperkelompokannya untuk melakukan tindakan yang dapat membuat si korban tidak nyaman , dan kemungkinan besar menimbulkan cedera. Dalam melakukan perundungan ini, anak yang menjadi pelaku perundungan (bullying), biasanya memiliki dendam pribadi kepada si korban atau karena lingkungan yang membuat anak tersebut menjadi pelaku perundungan..

4) Dampak Negatif dari korban Bullying

Pasti saja dalam perbuatan perundungan(bullying) mempunyai akibat negatif terhadap korban, disebabkan tidak cuma melanda pada raga saja melainkan melanda pada psikis dari korban perundungan(bullying)

1. Kecemasan Sosial

Dimana kecemasan sosial ini berkaitan dengan kesepian, merasa takut, tidak mempunyai reaksi kepada orang lain, beraksi negative terhadap orang lain, senantiasa beranggapan kurang baik terhadap orang lain.

2. Hilangnya rasa percaya diri

Korban yang mengalami perlakuan perundungan(bullying) ini bakal cenderung hilangnya rasa yakin diri, serta senantiasa memandang kalau dirinya tidak sanggup, tidak berharga, tidak pantas guna jadi yang terbaik, serta banyak pemikiran negative menimpa diri sang korban.

3. Mengalami Stres dan Depresi

Seseorang korban yang mengalami tindak perundungan(bullying) yang sangat parah, sehingga menyebabkan korban merasa tertekan serta akhirnya memunculkan stress serta tekanan mental, disebabkan perlakuan perundung yang tiap hari membuat cedera yang membekas di hati korban, sehingga memunculkan korban hadapi tekanan mental yang mungkin, apabila perundung terus menerus melaksanakan perundungan tersebut, hendak menyebabkan niatan sang korban untuk memutuskan mengakhiri hidupnya.

4. Prestasi yang menurun

Hilangnya konsentrasi serta atensi pada pelajaran menyebabkan sang korban hadapi penyusutan dalam prestasi, perihal ini disebabkan perlakuan perundungan(bullying) yang menyebabkan korban mengalami tekanan, gampang terguncang, sehingga tidak bisa mengalami dengan baik.

5. Melakukan Tindakan Kriminal

Para korban perundungan (*bullying*) dapat saja menerapkan aksi Kriminal disebabkan sebagai salah satu pelampias akibat perundungan(bullying) yang di alaminya. Contohnya korban memakai obat– obatan terlarang disebabkan, dengan memakai obat terlarang tersebut korban merasa nyaman, aman serta tenang.

6. Bunuh Diri

Perlakuan perundungan(bullying) yang sangat parah, bisa menyebabkan anak tersebut berfikir untuk mengakhiri hidupnya, disebabkan sang korban berfikir dengan metode mengakhiri hidupnya bisa menuntaskan permasalahan serta penderitaan yang dialami, padahal itu semua tidaklah benar.

5) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying

Bagi Satjipto Raharjo penafsiran menimpa perlindungan hukum merupakan selaku aksi pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia, yang mana orang tersebut merasa dirugikan orang lain, setelah itu perlindungan hukum tersebut hendak diberikan kepada warga, dimana warga tersebut bisa menikmati hak– hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Sehingga dari itu sudah jelas aparat hukum harus menegakkan hukum serta melaksanakan ketentuan sesuai gunanya, dalam penegakan hukum ada 3 faktor yang wajib dicermati, ialah:²¹

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit), Kepastian hukum ialah perlindungan yustisiabel terhadap aksi sewenang- wenang, yang mana seseorang tersebut memperoleh suatu yang diharapkan sepanjang ini. Maka dari itu Warga mengharapkan terdapatnya kepastian hukum yang mana diharapkan warga hendak lebih tertib.

2. Kemanfaatan(zweckmassigkeit), serta Hukum ialah hukum ataupun

²⁰ Salim HS,dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Desertasi,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 262

²¹ Sudikno Mertokusumo, Loc.cit

penegak hukum wajib membagikan khasiat kepada warga sehingga tidak hendak mencuat rasa resah didalam warga menimpa pelaksanaan dalam penegakan hukum yang berlaku.

3. Keadilan(gerechtigkeit), Hukum itu tidak melulu identik dengan keadilan. Tentu saja Hukum bertabiat universal, serta senantiasa mengikat tiap orang, bertabiat menyamaratakan. Kebalikannya keadilan bertabiat subyektif serta tidak menyamaratakan.

Dengan terdapatnya faktor penegakan hukum tersebut secara tidak langsung hukum membagikan proteksi terhadap seluruh ikatan hukum dari bermacam segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Tercantum dengan proteksi hukum terhadap anak, yang mana anak ialah generasi penerus bangsa, maka dari itu proteksi hukum terhadap anak buat kedepannya wajib berlangsung dengan sukses.

Menurut komentar Muchsin, proteksi hukum bisa melindungi serta meneruskan topik hukum dari hukum, peraturan yang berlaku, serta sanksi yang sudah diterapkan. Perlindungan Hukum bisa dibedakan jadi 2, yakni²² :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah setelah itu dirancang untuk menghindari pelanggaran. Dimana Ini merupakan konten yang tercantum dalam undang– undang serta peraturan untuk menghindari

²² Muchsin. Rule of Law (Supremasi Hukum)Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

sesuatu pelanggaran serta membagikan ciri ataupun batas dalam memenuhi kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan paling tinggi dari wujud sanksi. Sanksi ini berbentuk denda, penjara, serta vonis yang lain pada saat terbentuknya suatu sengketa ataupun pelanggaran. Disini yang diartikan sanksi paling tinggi ialah ialah sanksi terakhir ataupun opsi terakhir pada sesuatu pelanggaran.

Perlindungan hukum ialah cerminan dalam mewujudkan sesuatu tujuan– tujuan hukum. Tentu saja dalam proteksi hukum yang diberikan, telah cocok dengan ketentuan hukum baik perlindungan tersebut secara tertulis ataupun tidak tertulis. Oleh sebab itu ada banyak berbagai proteksi hukum. Proteksi hukum untuk anak– anak ialah salah satu wujud dari melindungi anak– anak di Indonesia, sebagaimana dipaparkan pada Pasal 20 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi:“...Negara, pemerintah, warga, keluarga, serta orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak...”²³

Berikutnya didalam Pasal 59 Undang- Undang No 23 tahun 2002 jo. Undang- Undang No 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan anak di sebutkan jika“...Pemerintah serta lembaga negeri yang lain berkewajiban

²³ Undang – Undang Noor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

serta bertanggung jawab untuk membagikan perlindungan spesial kepada anak dalam suasana darurat, berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas serta terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ ataupun seksual; Anak yang jadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif yang lain; Anak yang jadi korban pornografi; Anak dengan HIV/ AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/ ataupun perdagangan; Anak korban Kekerasan raga dan/ ataupun psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan sikap sosial menyimpang; serta Anak yang jadi korban stigmatisasi dari pelabelan terpaut dengan keadaan Orang Tuanya.”²⁴

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Dari bermacam literature yang terdapat bahwa sebutan tindak pidana hakikatnya ialah sebutan yang berasal dari terjaman kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam bermacam ragam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sebagian kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana– sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana. Sedangkan itu, dalam bermacam perundang– undangan itu sendiri,

²⁴ ibid

memakai bermacam sebutan guna merujuk pada penafsiran kata *strafbaarfeit*..²⁵

Tindak pidana merupakan suatu sebutan yang memiliki suatu penafsiran dasar dalam ilmu hukum, sebagai sebutan yang dibangun dengan pemahaman dalam membagikan karakteristik tertentu pada kejadian hukum pidana. Tindak pidana memiliki penafsiran yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit di lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan makna yang bertabiat ilmiah serta didetetapkan dengan jelas guna memisahkannya dengan sebutan yang dipakai dalam aktivitas sehari- hari dalam kehidupan bermasyarakat..²⁶

Para ahli asing Hukum Pidana memakai istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana maupun Kejadian Pidana, dengan sebutan::

1. **STRAFBAAR FEIT** adalah kejadian pidana;
2. **STRAFBARE HANDLUNG** diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. **CRIMINAL ACT** diterjemahkan dengan sebutan Perbuatan Kriminal..²⁷

Bagi Simons, strafbaarfeit bisa dimaksud sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bertabiat melawan hukum, yang

²⁵ Tongat.SH.,M.Hum, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UPT Penerbitan UMM, Malang ,2020, hlm. 101

²⁶ Amir Ilyas,SH., MH Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 18 - 19

²⁷ ibid

berhubungan dengan kesalahan serta yang dilakukan oleh orang yang sanggup bertanggungjawab. Sedangkan bagi Van Hammel, strafbaarfeit merupakan kelakuan orang yang diformulasikan dalam wet, yang bertabiat melawan hukum, yang pantas dipidana serta dicoba dengan kesalahan.²⁸

E. Tinjauan Tentang Kebijakan Penal dan Non Penal

Dikala ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan yang dicoba berbentuk pembunuhan, kekerasan serta yang lain, dan kejahatan ini tidak cuma dilakukan oleh orang berusia saja tetapi sikap ini bisa mendorong anak dalam melakukan tindak kejahatan, contoh saja dalam tindak kejahatan bullying. Penganggulan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana menggambarkan bagian dari kebijakan kriminal. Salah satu usaha guna menghindari serta menanggulangi hal ini ialah dengan metode menggunakan hukum pidana ataupun dapat di sebut(*penal policy*).

Pendekatan penal ialah metode menggunakan fasilitas pidana ataupun sanksi pidana. Pendekatan ini ialah pendekatan yang sangat tua dalam pidana sebab pendekatan ini bagi Gene Kassebaum sebagaimana dilansir Barda Nawawi serta Muladi ialah pendekatan yang usianya setua peradaban manusia, sehingga fasilitas penal ialah older philosophy of crime control(Barda Nawawi Arief serta Muladi 1994). Pemakaian

²⁸ Tongat.SH.,M.Hum, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UPT Penerbitan UMM, Malang ,2020, hlm. 102 &103

fasilitas pidana berarti memakai upaya paksa yang dimiliki hukum pidana melalui sistem peradilan pidana..

Bagi Sudarto, makna menimpa kebijakan penal ialah :

- a. Dalam makna kecil yakni seluruh asas serta tata cara yang jadi dasar atas pelanggaran hukum pidana
- b. Dalam makna luas yakni totalitas fungsi dari aparaturnya penegak hukum tercantum di dalamnya metode kerja dari majelis hukum serta polisi.

Bagi Ealau Dah Priwitt, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang berlaku dicirikan oleh sikap yang tidak berubah- ubah serta kesekian, baik yang membantunya ataupun yang mentaatinya ataupun yang terserang kebijakan itu..²⁹ Dapat disimpulkan kalau kebijakan penal ialah sesuatu sikap yang dilakukan untuk pelakon, selaku sesuatu wujud aksi pidana dengan tujuan buat mensejahterakan serta bertabiat adil untuk warga.

Sebaliknya kebijakan Non penal ialah upaya dalam menuntaskan kejahatan dengan tidak merujuk pada hukum pidana. Disebabkan dengan memakai jalan Non Penal ini bisa dimaksud selaku jalur alternatif dalam menuntaskan tindak pidana tanpa mengaitkan polisi serta hakim. Dengan ini dalam permasalahan anak kebijakan non penal ini dapat dituturkan dengan mediasi penal(penal mediation). Mediasi Penal ialah mempertemukan antara pelakon tindak pidana dengan korban. Aplikasi penyelesaian masalah pidana di luar majelis hukum tidak adanya landasan

²⁹ Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik. 2005. Alfa Beta. Bandung. Hal 7.

hukum resmi, hingga dari itu kerap terjalin suatu permasalahan yang bertabiat non- formal sudah terselip penyelesaian secara damai. Bila di anak mediasi penal tersebut diucap dengan diversi, Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penafsiran diversi merupakan pengalihan penyelesaian masalah Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian, Pasal 5 ayat(3) menegaskan“ dalam Sistem Peradilan Pidana Anak harus diupayakan diversi.³⁰

Diversi pada intinya memiliki tujuan supaya anak yang ikut serta dalam kasus hukum bisa bebas dari dampak negatif pelaksanaan pidana. Penyelesaian pidana lewat diversi bertujuan supaya pelaku menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan serta pasti saja merugikan orang lain. Oleh sebab itu, apabila diversi yang dicoba sukses disepakati dengan para pihak- pihak yang terpaut terutama pihak korban di tingkatan penyidikan(Polres) hingga anak(pelaku) akan segera mendapatkan pemulihan hak- haknya. Kebalikannya bila belum sukses diversi hendak dilanjutkan di tingkatan penyelidikan(Kejaksaan), serta jika senantiasa belum sukses diversi hendak diteruskan hingga di majelis hukum. Penerapan diversi di Kepolisian sangat lama 30(tiga puluh) hari(Pasal 29 Ayat(2) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), demikian juga pula di Kejaksaan sangat lama 30(tiga puluh) hari(Pasal 42 Ayat(2) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dari

³⁰ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

selanjutnya di Majelis hukum sangat lama 30(tiga puluh) hari(Pasal 52 Ayat(3) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).³¹

Bagi Pasal 7 ayat 1 serta 2 Undang– Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melaporkan kalau pada proses penyidikan, penuntutan serta pengecekan masalah Anak di majelis hukum negara harus dikerjakannya diversi terlebih dulu.³² Tetapi dilihat pula apakah anak tersebut tadinya sudah melaksanakan sesuatu aksi pidana ataupun tidak, bila tidak hingga hendak langsung dikerjakannya diversi tetapi bila pelakon sempat melaksanakan sesuatu tindak pidana langsung dikenakan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun. Setelah itu hasil konvensi Diversi bagi Pasal 11 Undang– Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa berupa perdamaian dengan ataupun tanpa ubah kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, keikutsertaan dalam pembelajaran ataupun pelatihan di lembaga pembelajaran ataupun LPKS sangat lama 3(3) bulan ataupun melaksanakan pelayanan masyarakat.

³¹ Azwad Rachmat Hambali, Maret 2019,” Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Volume 13, Nomor 1, 13 Maret 2018

³² Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak